PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIN HARTAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **969025**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 5.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/72 m2 di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA PAGAR ALAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA PAGAR ALAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA LAHAT, Rp. 400.000.000
7. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA LAHAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA LAHAT, Rp. 400.000.000
9. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA LAHAT, Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 658.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000

4. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**1.001.000.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**7.059.000.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**7.059.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.